

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 28 Maret 2015, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri bersama-sama merilis 'Visi dan Tindakan Bersama Membangun Jalur Sutra Sabuk Ekonomi dan Jalur Sutra Maritim Abad 21'. Inisiatif Jalur Sutra baru mewakili kebijakan luar negeri paling ambisius Xi, menunjukkan arah kebijakan baru untuk China dan aspirasinya untuk kekuasaan global. Inisiatif OBOR adalah cerminan dari kebangkitan China serta kekuatannya yang terus berkembang di arena global. Inisiatif baru China bersifat pragmatis, didorong oleh motivasi ekonomi, sejarah, dan strategis. Karena Tiongkok adalah negara dengan satu partai, proses perumusan kebijakan luar negeri kurang transparan dan tersembunyi dari dunia luar (Yu, 2017).

Dibandingkan dengan era sebelumnya, arah kebijakan luar negeri Tiongkok telah berubah secara substansial selama beberapa tahun terakhir, khususnya setelah 2008, dan sekarang lebih proaktif, tegas, dan didorong secara global. Dengan latar belakang perlambatan ekonomi domestik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menjadi salah satu pendorong utama pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di Tiongkok Xi. Situasi ekonomi domestik menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan dan implementasi inisiatif OBOR China. Mengingat meningkatnya saling ketergantungan regional di era globalisasi, inisiatif theOBOR adalah alat penting bagi Beijing untuk melenturkan kekuatan keuangannya guna memajukan kepentingan ekonomi China di luar negeri (Yu, 2017).

Secara umum, kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang berisikan kepentingan nasional negara terhadap kepentingan eksternal negara dalam hal memenuhi hal yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Adapun kebijakan luar negeri suatu negara seringkali bersifat kerja sama antar negara lain. Kerja sama internasional atau *international cooperation* memiliki tujuan utama, yakni untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional suatu negara yang tidak dimiliki di dalam negeri serta untuk memenuhi kepentingan terhadap potensi yang bisa didapatkan dari bekerja sama dengan negara lain. Apabila bercermin dari sejarah hubungan internasional semenjak berakhirnya masa perang dingin, negara-negara di dunia dalam mempertahankan eksistensinya mulai beralih dari penggunaan *hard power* yang bersifat *high politics* dengan mengedepankan aspek kekuatan militer berubah menjadi penggunaan *soft power* yang bersifat *low politics* dalam kerja sama internasional (Navira, 2017).

Pada dekade ini, salah satu contoh kerja sama internasional yang berpengaruh kuat dikancah internasional adalah kerja sama dalam skema *Belt Road Initiative* atau BRI yang dibentuk oleh Tiongkok *Belt Road Initiative* (BRI) adalah salah satu bentuk dari *soft politics* dengan menggunakan kebijakan ekonomi pembangunan yang melibatkan negara lain. *Belt Road Initiative* menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan ekonominya di dunia dengan cara berpegang pada lima prinsip kerja sama, diantaranya: kerja sama kebijakan, kerja sama infrastruktur, investasi, perdagangan, modal, dan obligasi orang-orang dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Tiongkok dan masyarakat dunia internasional menjadi makmur (Yu, 2017).

Urgensi pembangunan infrastruktur adalah untuk mendukung daya saing sektor riil, memberikan penguatan pada iklim investasi dan dunia usaha. Penguatan daya saing sektor riil, perlu dukungan kelancaran distribusi produk domestik dari/ke berbagai wilayah. Kelancaran jaringan distribusi dan lalu lintas antarwilayah akan mengurangi tekanan disparitas harga, mendukung tercapainya skala ekonomi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam kerangka ini, percepatan penyelesaian konektivitas internasional adalah gagasan cemerlang yang muncul dari ide BRI China (Yuniarto, 2017).

Secara garis besar, berbagai program dalam China BRI menerapkan dua paradigma utama yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (kawasan) dengan pengembangan infrastruktur melalui pendanaan bersama antara sumber negara dan swasta, dan perluasan pertumbuhan ekonomi dengan mengacu pada integrasi pasar secara internasional dan produksi yang masih terfragmentasi akibat rendahnya konektivitas inter-koridor, intra-koridor dan antar koridor di dalam wilayah ekonomi Tiongkok dengan sistem ekonomi di wilayah internasional. China BRI dengan usulan programnya hendak melakukan upaya pembangunan infrastruktur dalam program perluasan ekonomi Tiongkok (dan pengaruh sosial-politik yang akan juga mereka bawa) dengan memfokuskan pada perluasan area yang nantinya akan menghubungkan pusat-pusat ekonomi dunia. Sebuah program yang sangat ambisius dari pemerintah Tiongkok, namun sangat menjanjikan beragam keuntungan yang dapat diraih (Yuniarto, 2017).

*Belt Road Initiative* merupakan proyek yang sangat penting dari sudut pandang positifis, hal ini di latar belakang tujuan dari kehadiran *Belt Road Initiative* yaitu membawa dunia menjadi lebih maju dengan memfasilitasi ke arah globalisasi yang adil. Kondisi seperti ini membantu

membuka konektivitas (baik sosial, ekonomi, maupun politik) di area di mana pembangunan infrastruktur yang saling menghubungkan negara. *Belt Road Initiative* menjadi salah satu contoh nyata Revolusi Interkonektivitas Global. *Belt Road Initiative* bisa dikatakan sebagai interkonektivitas global karena dukungan dari wilayah ekonomi koridor yang tersebar diberbagai belahan dunia. Terhitung pada tahun 2015, jumlah ekonomi koridor yang melibatkan kehadiran *Belt Road Initiative* telah berjumlah setidaknya ada enam ekonomi koridor, diantaranya: *Tiongkok-Central Asia-West Economic Corridor*, *New Eurasian Land Bridge Economic Corridor*, *Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar Economic Corridor*, *Tiongkok-Pakistan Economic Corridor*, *Tiongkok-Mongolia-Rusia Economic Corridor* dan *Tiongkok, dan IndoTiongkok-Peninsula Economic Corridor* (Yuniarto, 2017).

Perkembangan dan perluasan ekonomi koridor *Belt Road Initiative* tidak berhenti hanya di enam titik saja. Pada tahun 2017, Thailand menyusul menjadi bagian dari jalur ekonomi koridor *Belt Road Initiative*, ekonomi koridor milik Thailand kemudian diberi nama *Thailand Eastern Economic Corridor* (EEC). *Eastern Economic Corridor* diharapkan dapat menjadi jalur ekonomi koridor *Belt Road Initiative* yang dapat menghubungkan negara-negara Asia Tenggara dengan negara lain.

Letak *Eastern Economic Corridor* yang berada ditengah-tengah kawasan Asia Tenggara menjadi letak yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai jalur ekonomi koridor. Pengembangan kawasan ekonomi koridor di Thailand berfokus untuk mengembangkan tiga provinsi khusus yang ada di Thailand Timur dan dua provinsi pinggirannya Chachoengso, Chonburi, Rayong, Bangkok, dan Samut Parakan. Pemerintah Thailand telah meluncurkan inisiatif Thailand 4.0 untuk mengubah ekonominya dengan merangkul teknologi yang mengganggu

dan bergerak menuju Industri 4.0. Untuk memajukan pembangunan ekonomi, Thailand perlu menjadi ekonomi yang digerakkan oleh inovasi, dengan penekanan pada industri maju dan berbasis pengetahuan. Proyek Koridor Ekonomi Timur terletak di jantung skema Thailand 4.0 (Renliang, Kobjaiklang, & Temchavala).

Proyek Eastern Economic Corridor (EEC) adalah inisiatif pembangunan berbasis daerah dengan memanfaatkan Pesisir Timur yaitu pusat industri utama Thailand sejak 1980-an, di mana investor telah mengalami perjalanan investasi yang bermanfaat. Proyek EEC berfokus dalam 3 provinsi Timur, yaitu Rayong, Chonburi, dan Chachoengsao, dengan luas wilayah 13.000 kilometer persegi. Rencana pengembangan EEC mencakup peningkatan infrastruktur fisik dan digital yang ada serta peningkatan kesejahteraan sosial lebih lanjut. Kawasan EEC dirancang sebagai kotak pasir regulasi untuk memfasilitasi bisnis dan industri dalam meningkatkan daya saing negara. Rencana pembangunan EEC telah ditetapkan dengan regulasi yang jelas dan struktur tata kelola yang melibatkan instansi pemerintah, swasta, dan tenaga ahli di berbagai bidang (Attapich, 2020).

Hal yang janggal terkait kebijakan investasi Tiongkok pada proyek *Eastern Economic Corridor* yang membuatnya perlu diteliti latar belakangnya adalah, adanya keinginan Tiongkok yang ingin berinvestasi di Thailand bagian utara dan bukan di Thailand bagian timur, wilayah di mana eastern economic corridor dibangun. Sebelumnya, Tiongkok hanya tertarik untuk berinvestasi di kawasan Thailand utara dengan membangun *high speed rail* dan membangun *Thai Canal/Kra kanal*.

Namun pada tahun 2018, Tiongkok beralih untuk berinvestasi di kawasan Thailand bagian timur, di mana itu merupakan kawasan pembangunan *eastern economic corridor*. Anomali kasus ini yang

melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terkait kebijakan Tiongkok dengan menggunakan teori model *decision making*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Mengapa Tiongkok Ingin Berinvestasi Pada Proyek *Eastern Economic Corridor*?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menganalisis faktor pendukung pemerintah Tiongkok melakukan investasi pada proyek pembangunan *Eastern Economic Corridor*.
- b) Untuk mengetahui pengaruh birokratik politik dalam pembuatan kebijakan luar negeri investasi Tiongkok dengan skema *Belt Road Initiative* pada wilayah *Eastern Economic Corridor*.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis :  
Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi ataupun rujukan informasi bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional dalam memahami persoalan pentingnya keberadaan ekonomi koridor bagi pemerintah Tiongkok dan sebagai referensi ilmu hubungan internasional dikemudian hari.
- b) Manfaat Praktis :  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa ilmu hubungan internasional untuk membantu

menganalisis pengaruh *Belt Road Initiative* dalam politik internasional dan sebagai kebijakan luar negeri dikemudian hari.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **Teori Kepentingan Nasional;**

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling banyak dibicarakan. Dalam wacana politik internasional, konsep kepentingan nasional umumnya digunakan dalam menjelaskan perilaku negara atau kebijakan luar negeri yang diambil. Morgenthau mendefinisikan konsep kepentingan nasional dalam istilah “power” atau kekuasaan. Kepentingan nasional merupakan kondisi permanen yang memberi para pembuat kebijakan petunjuk rasional dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan nasional juga biasanya didefinisikan dalam istilah strategi dan kapabilitas ekonomi karena politik internasional merupakan suatu *struggle for power* antarnegara (Burchill, 2005).

Morgenthau mengakui definisi power akan berubah tiap waktu. Satu sisi kekuasaan ekonomi akan menjadi krusial, namun disisi lain kekuasaan militer atau budaya menjadi kepentingan vital bagi negara. Morgenthau berpandangan bahwa tujuan terakhir dari politik luar negeri adalah mempromosikan kepentingan diri (dalam hal ini adalah Negara) dengan mengubah pikiran penentangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Negara menggunakan “senjata” diplomasi, bisa berupa rayuan dan ancaman yang berkenaan dengan pemenuhan kepuasan atau penolakan kepentingan, seperti : propaganda, penciptaan keyakinan terhadap suatu pandangan, nilai-nilai moral dan bahkan kecenderungan-kecenderungan emosional yang mendukung kepentingannya sendiri. Diterjemahkan ke dalam arti lebih khusus, negara-negara harus bisa mempertahankan

integritas wilayahnya (physicalidentity); mempertahankan identitas politik (political identity); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya (Burchill, 2005).

Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial), identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain. Kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan demi kelangsungan hidupnya. Kepentingan vital dimaksud terdiri dari : Independence, self preservation, territorial integrity, military security, economic well-being (Burchill, 2005).

Diterjemahkan ke dalam arti lebih khusus, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (physicalidentity); mempertahankan identitas politik (political identity); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya (Burchill, 2005).

Politik luar negeri harus bisa membangkitkan 'ketakutan' dari negara lain sehingga mereka tidak berani melakukan serangan atau membangkitkan ancaman terhadap negara lain. Dalam perspektif ini, struktur internasional yang "anarkis" menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran penting negara. Kenneth Waltz, pemikir neo-realis



yang mencoba untuk merevisi pendekatan political realism klasik beranggapan bahwa perilaku negara tersebut didorong oleh struktur politik internasional yang anarkis, yang memaksa negara untuk berperilaku guna memertahankan kedaulatannya.

Neorealisme dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong Tiongkok membuat kebijakan BRI di EEC yaitu Tiap negara bergerak secara otomatis atas dasar kepentingan nasional dalam hal ini Tiongkok berusaha untuk memenuhi kebutuhan energinya sehingga Tiongkok berusaha mencari alternatif pasokan energi dan mengamankan jalur impor energi dari partner lamanya. Keamanan energi merupakan kepentingan vital bagi Tiongkok karena merupakan motor penggerak pembangunan industrinya. Neorealisme berbicara mengenai distribusi kekuasaan dimana tiap negara selalu berusaha menyeimbangkan power dari negara lainnya. Dalam hal ini Tiongkok berusaha mencari kepemimpinan di Asia Tenggara lewat Investasi BRI dalam pembangunan EEC di Thailand.

Neorealisme berbicara mengenai perilaku negara dalam sistem internasional yang menginginkan hegemoni di berbagai bidang. Dalam hal ini penulis melihat Tiongkok berusaha mencari hegemoni di bidang ekonomi dengan berusaha membentuk tatanan ekonomi global baru. Cina dapat mendominasi Timur seperti halnya raksasa Amerika mendominasi Barat. BRI membantu Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh yang lebih tinggi tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik tetapi juga di seluruh dunia, dan mencontohkan tujuan strategis Presiden Xi Jinping untuk menjadikan Tiongkok hebat kembali dan pemimpin sejati di panggung internasional.

## Kebijakan Investasi China

No	Benefit	Cost
1.	<p>BRI memberikan China kesempatan untuk memperluas tentakel ekonominya dan memperkuat hubungannya (misalnya, ekonomi, politik, keuangan) dengan negara lain di sepanjang jalan</p>	<p>Melibatkan lebih dari 4 miliar orang dari tiga benua dan PDB kumulatif sekitar US \$ 21 triliun</p>
2.	<p>Cina dapat mendominasi Timur seperti halnya raksasa Amerika mendominasi Barat. BRI membantu Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh yang lebih tinggi tidak hanya di kawasan Asia-Pasifik tetapi juga di seluruh dunia, dan mencontohkan tujuan strategis Presiden Xi Jinping untuk menjadikan Tiongkok hebat kembali dan pemimpin sejati di panggung internasional.</p>	<p>China harus siap dengan kerugian besar atas investasinya dengan beberapa faktor yakni: performa perusahaan yang tidak bagus, perlambatan ekonomi, rivalitas perusahaan, sampai perang dagang</p>
3.	<p>BRI dapat mengintensifkan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan China (misalnya, perusahaan publik dan swasta, negara, lembaga pemerintah, bank) karena</p>	

	mereka mewakili kepentingan nasional.	
4.	BRI merupakan sarana penting bagi untuk memenuhi permintaan rakus akan berbagai bahan mentah (misalnya, gas, minyak, bijih besi, tembaga)	

### **E. Hipotesis**

Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah “Mengapa Tiongkok Ingin Berinvestasi Pada Proyek *Eastern Economic Corridor*”. Sebagai jawaban sementara oleh penulis dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa keputusan kebijakan luar negeri Tiongkok untuk berinvestasi di proyek ekonomi koridor yang diinisiasi oleh Thailand dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam melegitimasi ekonomi kasawan Asia Tenggara dengan menjadikan Thailand sebagai pintu masuk.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1). Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis eksplanatif yang berguna untuk menganalisis faktor apa yang memengaruhi perubahan ketertarikan Tiongkok untuk berinvestasi di kawasan Thailand bagian timur, meskipun sebelumnya ingin berinvestasi di Thailand bagian utara dan bahkan dengan proyek yang berbeda. Adapun level analisa penelitian ini adalah negara dan hanya menggunakan satu. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data yang dikumpulkan tidak berupa angka.

## **2). Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yang pertama ruang lingkup batasan materi dan ruang lingkup batasan waktu. Adanya batasan ruang lingkup dan batasan waktu diharapkan dapat mengontrol alur dari penelitian ini agar tidak berkembang keluar dari kerangka dasar pemikiran awal. Adapun untuk batasan ruang lingkup penelitian ini adalah tentang kebijakan luar negeri Tiongkok pada isi investasi proyek *eastern economic corridor* Thailand, sedangkan untuk batasan waktu pengambilan data dan sumber terkait penelitian ini dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

## **3). Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan masalah yang dapat ditemukan melalui buku teks, media, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang berhubungan dengan topik pada penelitian yaitu kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap penetapan wilayah koridor ekonomi (*Eastern Economic Corridor*) di Thailand.

## **4). Analisis Data**

Dalam penelitian ini langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencantumkan beberapa poin penting, hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam penentuan alur jalannya penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini bentuk penyajian data yang digunakan oleh penulis adalah naratif dan juga beberapa dukungan data dengan menggunakan grafik, tabel dan gambar.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penelitian ini dimulai dengan jawaban sementara yang terlampir dalam hipotesa dan akan dikembangkan serta dibuktikan dari pencarian data dan perbandingan informasi untuk mencocokkan data agar dapat mengetahui dengan pasti hal apa yang melatarbelakangi investasi Tiongkok pada proyek ekonomi koridor di Thailand.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dasar-dasar dari penelitian ini berupa latarbelakang masalah, permasalahan, kajian teoritik, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan Bab pembahasan, oleh karena itu penulis akan menjabarkan analisis kebijakan investasi Tiongkok pada skema Belt Road Initiative (BRI) pada

pembangunan wilayah koridor ekonomi Thailand dengan menggunakan variabel dari Model Decision Making yaitu Kepentingan Nasional dan Keamanan Nasional untuk menyelaraskan hipotesa-hipotesa yang sudah dikemukakan sebelumnya, serta keuntungan investasi Tiongkok dalam pembangunan *Eastern Economic Corridor* di Thailand.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini penulis akan mengemukakan mengenai kesimpulan yang diambil dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya serta kendala yang dialami selama penelitian

